

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sektor publik merupakan suatu entitas atau organisasi yang kegiatannya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik demi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2018). Tujuan utama dari organisasi sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, transportasi publik, penegakan hukum, penyediaan barang publik sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan lainnya. Selain tujuan utama yang harus dicapai, organisasi sektor publik memiliki tujuan finansial yaitu terkait dengan peningkatan penerimaan negara, peningkatan laba pada BUMN/BUMD, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Tujuan finansial diorientasikan untuk memaksimalkan pelayanan publik, karena dalam memberikan pelayanan diperlukannya anggaran yang diajukan agar sumber dana yang berasal dari masyarakat dapat dinikmati kembali oleh masyarakat (Abdul Halim, 2012).

Adapun sumber dana atau pembiayaan sektor publik berasal dari masyarakat berupa pajak dan retribusi. Selain itu juga berasal dari laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah dan pendapatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indra Bastian, 2010). Sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik atas penggunaan sumber dana tersebut haruslah membuat laporan keuangan sektor publik (Abdul Halim, 2012).

Laporan keuangan sektor publik adalah informasi keuangan yang disajikan oleh organisasi publik untuk membantu para penggunanya dalam mengambil keputusan. Namun permasalahan yang terjadi pada sektor publik adalah ketaatan, transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangannya. Permasalahan inilah yang membuat para penggunanya kurang mempercayai kinerja organisasi sektor publik dan menghambat kinerja organisasi publik. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan juga meningkatkan kinerja internal instansi, maka pemerintah memberi pedoman bagi organisasi publik berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melaksanakan sistem akuntansinya. Dengan adanya SAP kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem akuntansi dapat ditangani, kinerja instansi publik semakin baik, dan penilaian publik terhadap ketaatan, transparansi, serta akuntabilitas atas laporan keuangan juga baik. Sebagai pedoman, Standar Akuntansi Pemerintah tidak hanya menjadi solusi tetapi juga dijadikan patokan dalam menyusun laporan keuangan sektor publik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Daerah, setiap OPD wajib menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Laporan keuangan ini harus disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Semua laporan keuangan dari OPD ini kemudian akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah yang diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala daerah melakukan tanggapan dan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Penyusunan laporan keuangan menjadi salah satu hal yang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi publik terkait finansial, karena menyangkut pelayanan publik sehingga uang rakyat harus disampaikan alokasi penggunaannya kepada publik. Oleh karena itu instansi atau organisasi publik harus menyusun laporan keuangan yang sesuai prosedur sebagai wujud ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas instansi publik serta membantu dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Penyusunan laporan keuangan harus mengikuti prosedur yang telah diatur pada SAP, sehingga diharuskan bagi organisasi sektor publik dalam hal ini yaitu instansi pemerintahan untuk mematuhi prosedur dalam pedoman tersebut. Dan hal ini sebagai tanggungjawab yang tidak dapat dihindari oleh instansi pemerintah.

Prosedur penyusunan laporan keuangan pada instansi pemerintah tentu berbeda dengan instansi swasta karena karakteristik dari keduanya bertentangan. Apabila dalam penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah sudah sesuai dengan prosedur pada SAP maka memudahkan pengguna internal untuk

meningkatkan kinerja dalam memberi pelayanan kepada publik. Hal itu tak terkecuali pada instansi pemerintahan di kecamatan kota Kupang sebagai entitas akuntansi yang seharusnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Pengelolaan keuangan instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut Mahmud (2007), entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan entitas pelaporan. Selaku entitas akuntansi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pegawai bagian keuangan yang terdiri dari Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK OPD). PPK OPD bertugas menyiapkan laporan keuangan OPD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah selaku entitas pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penyajiannya, laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus dapat menghasilkan informasi akuntansi yang memenuhi beberapa karakter

kualitatif sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dipercaya, serta dapat dibandingkan dan juga dapat dipahami.

Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup memadai. Agar menghasilkan informasi keuangan yang baik tentunya harus dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah tanpa terkecuali termasuk di dalamnya adalah Kantor Camat di Kota Kupang.

Terdapat 6 (enam) kantor camat yang berada di Kota Kupang, yaitu ; (1) Kecamatan Kota Lama, (2) Kecamatan Alak, (3) Kecamatan Kelapa Lima, (4) Kecamatan Kota Raja, (5) Kecamatan Oebobo, dan (6) Kecamatan Maulafa. Sebagai entitas akuntansi, 6 (enam) kecamatan di kota kupang berkewajiban menyusun dan meyediakan laporan keuangan untuk menyampaikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang disusun digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas serta efisiensi kegiatan serta membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Selain itu, laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas, dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Kegiatan menyusun laporan keuangan membutuhkan peran manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor pendukung keberhasilan suatu usaha sangat ditentukan dari bagaimana pegawai yang bekerja. Pentingnya peranan

SDM sebagai pegawai yang terlibat dalam organisasi, maka perlu memahami jenis pekerjaan dan memiliki pengalaman kerja yang tinggi agar mekanisme kerja tetap terjaga dengan baik. Penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pengalaman kerja (Yenni, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan dapat menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang.

Dengan tingkat pendidikan yang memadai, seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Penelitian dari Mutiari & Yudiantara (2021); Asrida & Maharini (2020), pendidikan mempengaruhi kemampuan manajemen dalam penyusunan laporan. Demikian juga dengan penelitian dari Muzahid (2014), terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah antara lain tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan lama pengalaman kerja. Menurut Ibrahim dan Sari (2014), faktor yang mempengaruhi kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah antara lain pendidikan, pelatihan, komitmen pimpinan, ketersediaan peraturan dan perangkat pendukung. Menurut Wiraputra (2014) terdapat banyak faktor yang

mempengaruhi kemampuan penyusunan pemerintah daerah antara lain latar belakang pendidikan dan pemahaman standar akuntansi.

Setiap orang yang memiliki pengalaman yang luas, akan lebih mudah berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaannya baik di organisasi, perusahaan maupun juga di pemerintahan. Dengan demikian orang-orang yang berpengalaman mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengerjakan tugas-tugas perusahaan dengan baik dibandingkan dengan orang yang belum berpengalaman. Pengalaman adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik (Teguh, 2008).

Semakin lama pegawai bekerja dalam bidang di organisasi, maka akan semakin berpengalaman pegawai tersebut dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. Hal ini senada dengan penelitian Yenni (2017); Asrida & Maharini (2020), pengalaman kerja mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Keterampilan mengelola organisasi secara sistematis akan menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar (Asrida & Maharani, 2020;642).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurwanti, dkk (2022) dengan judul Pengaruh Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Pengalaman Kerja terhadap penyusunan Laporan Keuangan mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pengalaman kerja terhadap

penyusunan laporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Iwan Hermansyah dan Rina Marlina (2019) dengan judul Peran Kompetensi Staf Akuntansi dalam Pencapaian Kualitas Informasi Keuangan Daerah mengatakan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Luh Sukriani, dkk (2018) dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BUMDES di Kecamatan Negara, mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Jhon Fiesgrald Wungow, dkk (2016) dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan, dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengatakan bahwa tingkat pendidikan dan masa kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzahid (2014), yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan dan masa kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eriva (2013), yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan dan masa kerja berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Penyusunan

Laporan Keuangan Pada Kantor Camat di Kota Kupang”, yang bertujuan untuk menguji tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan, dan menguji pengalaman kerja pegawai berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kantor Camat di Kota Kupang”.

## **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka persoalan penelitian dari penelitian ini adalah;

1. Apakah tingkat pendidikan pegawai berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat di Kota Kupang?
2. Apakah pengalaman kerja pegawai berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat di Kota Kupang?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk;

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pegawai terhadap penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat di Kota Kupang.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja pegawai terhadap penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat di Kota Kupang.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Penyusunan Laporan Keuangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah khususnya Kantor Camat di Kota Kupang dalam hal merekrut pegawai terkhusus pada bagian keuangan dengan memperhatikan pendidikan dan pengalaman kerja rekrutan tersebut.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Penyusunan Laporan Keuangan.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Pegawai terhadap Penyusunan Laporan Keuangan.